

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.

Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administartif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2015, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta.

Asmuni, 2017, *Konsep Pelaksaaan Keputusan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik*, Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta.

HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedelapan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

HS, Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta)*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Keempat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Manullang M, E Fernando, 2017, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Marbun, S.F, 2018, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keduapuluh satu, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.

- Putra Fadillah, Muchsin H, 2015, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua, Averroes Press, Surabaya.
- Soehino, 1984, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keenambelas, PT. Intermasa, Yogyakarta.
- Sumardjono, SW Maria, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunarto, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesatu, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Bandung.
- Tanuwidjaja, Henny, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT. Ichtsar Baru Van Hoeve, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

## **Karya Ilmiah**

### **Tesis**

Amrullah, Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kota Yogyakarta, 2010.

Febriani, Yeni, “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Memasuki Usia 65 (enam puluh lima) Tahun atau Telah Meninggal Dunia di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman, 2014.

## **Artikel/Jurnal**

Ida Ayu MD Dwi Sukma Cahyani, “Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris  
Kepada Penerima Protokol”, *Jurnal*, Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas  
Hukum Universitas Udayana, Kota Denpasar, 2017.